



# JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI MANAJEMEN DAN KEUANGAN

Vol. 01 No. 02 November 2017

Hal. 127 - 140

**JPEKA**

## Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya

Ummy Zulfa Rahmatin<sup>1</sup>, Prof.Dr.H Ady Soejoto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, versitas Negeri surabaya, zulfaain@gmail.com

<sup>2</sup> Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri surabaya, adysoejoto@unesa.ac.id

### Abstrak

Indikator pendidikan berupa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Surabaya rata-rata mencapai 90%, kecuali pada kelompok usia 16-18 tahun masih mencapai 75%. Kompleksnya permasalahan masyarakat di Surabaya memicu rendahnya APS terutama dalam masalah sosial-ekonomi. Penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif ini memprediksikan pengaruh sosial-ekonomi melalui tingkat kemiskinan. Sementara itu, perubahan jumlah sekolah untuk menjangkau masyarakat ekonomi lemah, diharapkan dapat menyerap jumlah siswa, sehingga akan berpengaruh pada APS. Hasil uji regresi menunjukkan, tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan sebesar 55,33% dimana pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah sebesar 22,62% dan 32,71%. Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan APS dan sebaliknya. Begitu pula kenaikan jumlah sekolah akan diikuti oleh penurunan APS. Meskipun jumlah sekolah lebih dominan, tetapi terdapat pengaruh kebijakan pemerintah yang mendominasi perubahan jumlah sekolah. Penurunan jumlah sekolah sebagai keputusan pemerintah dalam mengembalikan kestabilan angka APS, artinya selama APS belum meningkat maka beberapa sekolah perlu ditutup untuk memudahkan fokus pemerintah pada peningkatan APS.

**Kata Kunci:** APS, tingkat kemiskinan, jumlah sekolah.

### Abstract

*The indicator of educational School Enrollment Rate (APS) in Surabaya was average about 90%, except in ages of 16-18 y.o that still get to 75%. The complexity of society's problems in Surabaya caused the lower of APS especially in socio-economic's problem. The research with quantitative descriptive approach will estimate the impact of socio-economic about poverty's level. Meanwhile, the change of school's number to reach low economic-communities is expected to absorb quantity of students that will give the effect to APS. The output of regression test show that the poverty's level and school's number have negative effect that significant amount 55,33% with each influence of poverty's level and school's number amount 22,62% and 32,71%. Increasing of poverty was followed by the lower of APS and otherwise. So the increasing of school's number was followed by the lower of APS. Although the school's number was more dominant, but there influence on policy's government that dominates to changes in school's number. Reduction in school's number as a decision of government to restore APS stability which means that during the APS did not increase, some schools must be closed for efficiency of government's way for increasing the APS.*

**Keywords:** APS, poverty's level, school's number.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang terus diupayakan oleh pemerintah demi memperbaiki mutu masyarakat Indonesia. Namun realitanya, masyarakat sendiri enggan mendukung sepenuhnya dalam mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan (Qomar, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai kendala dalam upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya karena rendahnya peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. salah satu komponen dari tiga belas faktor yang menjadi kendala peningkatan mutu pendidikan menurut Fattah (2006) yakni masalah sosioekonomi masyarakat.

Wujud dalam keberhasilan program pemerintah dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah. Menurut Rodliyah (2013), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi dalam suatu kelompok yang dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam mencapai keberhasilan sebuah program (tujuan). Ukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang memasuki jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA/se-Derajat) terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan setiap tahunnya. Indikator yang digunakan secara matematis oleh BPS dalam mengukur tingkat partisipasi disebut Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Fenomena yang terjadi pada APS di Kota Surabaya yakni terdapat kesenjangan pada salah satu jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS Kota Surabaya, survei tahun 2015 menunjukkan prosentase APS yang terendah terdapat pada usia 16-18 dimana prosentasenya masih mencapai angka 75% dibandingkan dengan APS jenjang

lainnya yang rata-rata di atas 90%. Sementara itu, APS yang tercapai tahun 2013 sebesar 64,14% dimana angka tersebut lebih rendah dari tahun 2012 yakni sebesar 69,68%. Padahal pada kelompok usia ini sebelumnya pernah mencapai angka 85,87% namun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2014.

Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi menjadi pokok masalah dalam peningkatan partisipasi pendidikan di Kota Surabaya. Realisasi angka putus sekolah di Kota Surabaya yang terus ditekan oleh pemerintah ternyata belum mencapai titik minimum. Salah satu penyebab angka putus sekolah yakni akibat masalah sosial ekonomi yang masih buruk. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di Kota Surabaya pada tahun 2013 sebesar 6% dengan perubahan penurunan hanya sebesar 0,23% dari tahun 2012 (Sumber: BPS Jawa Timur). Puncak tingginya angka putus sekolah selama beberapa kurun waktu terakhir sebesar 6000 anak pada tahun 2012.

Sementara itu, sasaran peningkatan partisipasi sekolah terutama untuk masyarakat ekonomi lemah dapat didukung dengan peningkatan sarana prasarana. Wujud pemerintah dalam hal ini yakni dengan merencanakan berdirinya sekolah-sekolah baru sebagaimana tujuan pemerataan pendidikan pada langkah ketiga adalah pemerataan penyediaan sekolah (Johri: 2005). Upaya tersebut diharapkan sejajar dengan jumlah sekolah di Surabaya yang termasuk jumlah tertinggi di Jawa Timur yakni mencapai 1580 unit dari total keseluruhan jenjang pendidikan pada tahun 2014.

Neilson and Zimmerman (2014) mengemukakan bahwa pembangunan sekolah pada daerah perkotaan miskin dapat memicu peningkatan angka pendaftaran siswa. Sebagai dasar penelitian yang relevan, kondisi ekonomi masyarakat di daerah kota yang menjadi kendala dalam peningkatan angka pendidikan dapat dilihat pada tingkat kemiskinan. Sehingga dengan upaya penyediaan akses pendidikan seperti tempat sekolah terdekat dapat memicu partisipasi penduduk untuk mengikuti pendidikan.

Korelasi yang terjadi antara masalah sosioekonomi terhadap program pemerintah dalam rangka mencapai peningkatan APS dinyatakan dalam rumusan masalah berikut: (i) Apakah terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya?; (ii) Apakah terdapat pengaruh jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya?; dan (iii) terdapat pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Surabaya?.

Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui: (i) pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya; (ii) pengaruh jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya; dan (iii) pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Surabaya.

Kajian teoritis yang digunakan untuk mengkaji objek penelitian yakni APS didasarkan pada studi yang dilakukan Al-Qudsy (2003), menyebutkan bahwa latar belakang keluarga menjadi faktor utama dalam

tingkat pendaftaran sekolah serta munculnya angka putus sekolah. APS tidak dapat lepas dari peran orang tua/masyarakat karena pada hakikatnya pendidikan berlangsung dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Rodliyah: 2013).

Pada program pemerataan pendidikan akan melihat tingkat kemiskinan sebagai kendalanya dan jumlah sekolah sebagai salah satu hal yang menunjang pemerataan tersebut. Sementara itu, APS akan melihat capaian pemerataan pendidikan dengan adanya kendala dan upaya lain sebagai penunjangnya. Dengan demikian demi meningkatkan perolehan APS, pemerintah perlu memerhatikan kondisi masyarakat miskin serta kebutuhan penyediaan sekolah yang masih belum terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002: 3). Sedangkan menurut Suharto dkk (2004) secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan. Literatur dalam sebuah artikel internasional oleh Mulfred et al. (2008) menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia merupakan masalah besar dan memiliki hubungan terhadap pendidikan.

Adanya kendala ekonomi, masyarakat dengan ekonomi lemah juga memiliki kendala dalam mengakses layanan pendidikan. Keberadaan sekolah yang belum tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, dapat

membatasi pengetahuannya dalam mengakses pendidikan. Keberadaan sekolah juga memberikan pengaruh besar dalam proses pendidikan karena kondisinya yang memiliki keteraturan sehingga lebih mengontrol anak didik (Fananie, 2011:25). Untuk mencapai pendidikan bermutu dengan adanya kebijakan pendidikan dan budget, kurikulum dan sarana juga merupakan bagian infrastruktur, menjadi faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan nasional (Chan dan Emzir, 2010). Terlepas dari kurikulum, infrastruktur sarana dan prasarana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 45 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Pada program pemerataan pendidikan akan melihat tingkat kemiskinan sebagai kendalanya dan jumlah sekolah sebagai salah satu hal yang menunjang pemerataan tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yakni penelitian dengan menggunakan data berupa angka (Bungin, 2005). Data berupa angka yang terkumpul dalam penelitian kuantitatif akan dianalisis untuk diperoleh hasilnya melalui metode statistik deskriptif (Zuriah, 2006:113). Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan, rancangan penelitian ini menggunakan jalur linear. merupakan paradigma ganda yang memiliki dua variabel independen X1 dan X2, serta satu

variabel dependen Y. Arah panah secara individu pada masing-masing variabel independen untuk menganalisis hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y. Penghitungan analisis hubungan tersebut menggunakan teknik korelasi sederhana. Sedangkan arah panah secara bersama-sama dari kedua variabel independen menunjukkan hubungan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y dengan teknik korelasi ganda.

Pada teknik pengumpulan data, menggunakan metode dokumenter dimana data yang akan diambil tersedia dalam bentuk dokumentasi berupa bahan laporan lembaga Badan Pusat Statistik (BPS). Data dokumenter tersebut berupa dokumen resmi dari pihak ekstern berupa bahan-bahan informasi yang diterbitkan oleh suatu lembaga dan disediakan untuk pihak luar lembaga (Bungin, 2005:144).

Penelitian ini menggunakan hubungan kausalitas yang bersifat sebab akibat dimana perubahan variabel Y disebabkan oleh faktor X. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh dan perkiraan nilai variabel X terhadap variabel Y akan diuji menggunakan teknik regresi. Uji regresi yang digunakan adalah regresi berganda karena variabel yang terdapat dalam penelitian lebih dari dua. Pada uji regresi berganda meliputi uji hipotesis parsial, uji hipotesis bersama-sama, dan uji koefisien determinasi. Sebelum melakukan uji tersebut, karena pengujian penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) maka model regresi linear harus memenuhi syarat asumsi klasik (Ajija dkk: 2011). Asumsi-asumsi tersebut diantaranya uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji linearitas.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 16-18 tahun yang terdapat di Kota Surabaya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan dan penurunan yang terlihat pada tahun 2009 hingga 2015. Pada kurun waktu tahun 2000-2003, keadaan tersebut telah menunjukkan penurunan secara berturut-turut, yakni dari jumlah 64.66% (2000) hingga menjadi 57.73% (2003). Tabel 4.1 menunjukkan berbagai tingkat capaian APS dari tiga kelompok usia sebagai perbandingan angka yang telah dicapai selama tujuh tahun.

**Tabel 1 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Surabaya Tahun 2009-2015**

Tahun	Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
2009	99,47	91,19	80,97
2010	98,83	93,53	85,87
2011	97,87	93,99	71,69
2012	98,95	95,48	69,68
2013	99,10	97,69	64,14
2014	100,00	98,66	73,34
2015	100,00	98,53	75,19

Sumber: BPS Kota Surabaya-Susenas, 2009-2015

Dapat terlihat pada tabel tersebut, perbandingan perubahan APS dari seluruh kelompok usia yang masih memiliki capaian terendah yakni pada usia 16-18. Prosentase yang tercapai jauh dari capaian prosentase pada kelompok usia lainnya yang sejak tahun 2009 telah mencapai lebih dari 90%.

Sementara itu, berdasarkan laporan BAPPEDA Jatim (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur) tahun 2012 terjadi peningkatan angka putus sekolah di Surabaya yang mencapai jumlah 6.000 anak.

**Tabel 2 Angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin Kota Surabaya tahun 2010-2014**

Kemiskinan	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Kemiskinan (%)	6,68	6,06	5,62	5,29	5,76
Garis Kemiskinan (Rp)	282.586	310.074	339.208	372.511	393.151
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	195,7	183,3	175,7	169,4	164,4

Sumber: BPS Jawa Timur-Susenas: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota (2010-2014)

Besarnya angka putus sekolah tentu berpengaruh pada jumlah anak yang pada tahun tersebut masih melanjutkan sekolah. Realisasi angka putus sekolah di Indonesia khususnya Kota Surabaya yang terus ditekan oleh pemerintah ternyata belum mencapai titik minimum. Salah satu penyebab angka putus sekolah yakni akibat masalah sosial ekonomi yang masih buruk. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di Kota Surabaya pada tabel 2.

Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi menjadi pokok masalah dalam peningkatan partisipasi pendidikan di Kota Surabaya. Meskipun angka kemiskinan sedikit demi sedikit mengalami penurunan dari 6,68% (2010) hingga menjadi 5,76% (2014), namun partisipasi pendidikan masih tergolong rendah apalagi pada APS kelompok usia 16-18 tahun justru mengalami penurunan 64,14% tahun 2013 dari jumlah sebelumnya 69,68% pada tahun 2012.

Bantuan pemerintah selain ditujukan pada siswa langsung juga dialokasikan untuk mendirikan sekolah baru dalam rangka persiapan peningkatan pendaftaran siswa sebagaimana program pemerintah untuk

meningkatkan APS. Jumlah sekolah pada jenjang SMA-sederajat yang hingga saat ini tersedia sesuai dengan jumlah permintaan murid. Meskipun demikian, dari 1580 unit sekolah, jumlah sekolah SMA-sederajat hanya berjumlah 257 unit. Artinya jumlah sekolah SMA-sederajat hanya 16,27% yang menyumbang akses pendidikan di Surabaya.

#### Analisis Data

##### Hasil Uji Regresi

Hasil persamaan regresi berganda dari penghitungan OLS adalah sebagai berikut:

$$Y = 108.7143 - 2.673331 X1 - 0.090782 X2 + e$$

Interpretasi model regresi tersebut sebagai berikut:

Y : nilai dugaan untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS).

$\beta_0$  : 108,7143 artinya ketika X1 (tingkat kemiskinan) dan X2 (jumlah sekolah) bernilai nol, maka nilai Y (APS) sebesar 108, 7143.

$\beta_1$  : -2,673331 artinya jika X1 (tingkat kemiskinan) meningkat sebesar 1% sedangkan X2 bernilai tetap, maka secara rata-rata Y (APS) akan turun sebesar 2,673331

$\beta_2$  : -0.090782 artinya jika X2 (jumlah sekolah) meningkat sebesar 1 unit sedangkan X1 bernilai tetap, maka secara rata-rata Y (APS) akan turun sebesar 0.090782

##### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil estimasi dengan uji LM diperoleh nilai probabilitas dari Obs\*R-squared sebesar 0,3499. Nilai p-value Obs\*R-square = 0,3499 > 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dengan tingkat keyakinan 95%,

tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

##### Uji Multikolinearitas

Hasil uji estimasi dengan metode Variance Inflation Factors dari masing-masing variabel sebesar  $1.041378 < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model prediksi.

##### Uji Heterokedastisitas

Melalui uji White Heterocedasticity, nilai p-value Obs\*R-square= 0.4099 > 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95% tidak terdapat heterokedastisitas.

##### Uji Normalitas

Uji ini menggunakan metode Jarque-Berra (JB Test) dimana nilai p-value= 0,526117 > 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95%, dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal.

##### Uji Linieritas

Uji Linearitas yang digunakan adalah metode Ramsey Test. Nilai p-value F-stat.= 0.5330 > 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95%, hubungan yang terjadi antar variabel bersifat linear.

##### Uji Hipotesis

##### Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t untuk masing-masing variabel tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap APS dijelaskan sebagai berikut:

Uji parsial koefisien regresi X1 (Tingkat Kemiskinan) terhadap Y (APS) dimana nilai p-value = 0.0350 < 0,05 maka H0 ditolak.

Jadi, ada pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap APS.

Uji parsial koefisien regresi X2 (Jumlah Sekolah) terhadap Y (APS) dimana nilai  $p\text{-value} = 0.0113 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Jadi, ada pengaruh antara jumlah sekolah terhadap APS.

#### Uji Signifikansi F (Uji F)

Nilai F tabel memiliki derajat bebas (db),  $v_1 = 3 - 1 = 2$  ;  $v_2 = 17 - 3 = 14$ , dimana m: jumlah variabel dan n: jumlah sampel. Sehingga  $F_{\alpha;(v_1)(v_2)} = 3,74$ , hasil uji F-statistic sebesar  $8.673450 > 3,74$ . Sedangkan nilai  $p\text{-value} = 0.003544 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Jadi, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap APS.

Koefisien Determinasi  $R^2$  atau ( $R^2$  adjusted)

Pada hasil estimasi menunjukkan nilai  $R^2$  adalah 0.553385. nilai tersebut diatas 0,5 sehingga lebih dari 50% mendekati angka 1. Artinya bahwa variabel independen (tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah) bersama-sama dapat menjelaskan variasi sebesar 55,33% pada variabel dependen (APS).

Sementara itu, besarnya kontribusi masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dapat diperoleh dengan melihat tabel coefficients dan correlations. Dengan penghitungan perkalian nilai Standardized Koefisien Regresi X1/X2 dikali dengan korelasi Y dan X1/X2, dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh sebesar 22,62% terhadap APS, sedangkan X2 berpengaruh sebesar 32,7% terhadap APS. Sehingga dari kedua variabel tersebut, variabel jumlah sekolah memiliki

kontribusi atau lebih mendominasi terhadap APS.

### **Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Surabaya**

Sebagai salah satu indikator penting dalam pendidikan, APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah (sumber: Statistik Pendidikan 2009). Masyarakat sebagai sasaran utama APS dimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pendidikan akan ditentukan oleh motif masyarakat sendiri. Secara garis besar, keluarga menjadi pemilik utama atas keputusan mengikutsertakan anak atau anggota keluarganya untuk mengenyam pendidikan formal. Chankseliani (2014) pada studi komparatifnya menyebutkan tiga sumber utama yang dapat menjelaskan berbagai tingkat pendaftaran sekolah swasta di Negara-negara bekas-Soviet: berasal dari permintaan atau keputusan keluarga, dari penawaran bisnis swasta, dan keberadaan kelompok keagamaan dan filantropi.

Hasil penelitian ini melalui uji regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap APS. Artinya jika tingkat kemiskinan mengalami kenaikan maka APS akan mengalami penurunan. Pada data tingkat kemiskinan selama tujuh belas tahun terakhir dapat dilihat bagaimana rata-rata perubahannya berpengaruh pada APS. Tahun 2000 tingkat kemiskinan turun sebesar 0,22% diikuti oleh kenaikan APS sebesar 8,3%. Namun pada tahun berikutnya saat kemiskinan naik sebesar 3,74% maka APS juga turun sebesar 7,8%. Perubahan secara signifikan dari kedua variabel tersebut sepenuhnya dapat

terlihat pada tahun 2004 hingga 2006 dimana kemiskinan sedikit demi sedikit mengalami penurunan hingga 2,23% sementara diikuti oleh kenaikan APS berturut turut dari jumlah 67,79% menjadi 69,56%. Walaupun pada tahun-tahun berikutnya penurunan kemiskinan belum tentu diikuti dengan kenaikan APS, namun perubahan kedua variabel cukup stabil hingga data selama lima tahun terakhir menunjukkan angka APS terus naik hingga tahun 2015 sebesar 75,19%.

Pengaruh perubahan APS yang disebabkan faktor tingkat kemiskinan berkontribusi sebesar 22,62%. Jika diperhatikan secara runtut, keberadaan masalah kemiskinan di Kota Surabaya sukar untuk dibebaskan secara keseluruhan. Seorang ahli ekonomi bernama Nurkse menyebutkan keberadaan masalah kemiskinan di negara berkembang dalam teori lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Teori ini menjelaskan dimana serangkaian kekuatan saling memengaruhi sehingga menyebabkan sebuah negara akan menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pembangunan dan akan tetap berada dalam keadaan miskin.

Teori lingkaran kemiskinan ini terbagi dalam tiga bentuk yang saling berkaitan secara sirkular dimana bentuk ketiga terdapat dalam masalah rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemahiran masyarakat. Berdasarkan teori tersebut bahwa negara berkembang akan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan yang terjadi karena keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan belum dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal dibandingkan negara maju. Faktanya, kurang maksimalnya pengembangan kekayaan alam menyebabkan

tingkat pembangunan masyarakat akan tetap rendah (pendidikan rendah). Hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi saling ketergantungan dimana kekayaan alam yang belum dikembangkan menyebabkan produktivitas rendah sehingga pendapatan riil juga rendah dan akibatnya bagi masyarakat sendiri kekurangan modal bahkan untuk mengikuti pendidikan.

Survey internasional dalam studi pendaftaran sekolah swasta di negara-negara bekas Soviet menyebutkan, rata-rata pendaftaran di sekolah swasta adalah yang tertinggi di negara berpenghasilan rendah, di mana 22% siswa di sekolah dasar dan 36% di tingkat menengah terdaftar secara pribadi. Keadaan masyarakat ekonomi lemah di Kota Surabaya sebagaimana di kota lain dengan kasus yang sama menganggap, bahwa keberadaan sekolah pemerintah (negeri) akan lebih banyak mengeluarkan biaya dibandingkan sekolah swasta. Meskipun dalam faktanya tidak sedikit sekolah swasta yang lebih memasang biaya pendidikan mahal dengan catatan adanya kompetensi dan kualitas yang dijanjikan. Hal inilah yang tidak diketahui masyarakat bahwa sekolah pemerintah justru menyediakan bantuan pendidikan bagi masyarakat khusus agar mereka (masyarakat lemah ekonomi) tidak terbebani oleh biaya pendidikan. Namun upaya tersebut juga belum dapat merata, artinya pemerintah menerapkan adanya kuota pada penerimaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Selain itu, akses untuk mengetahui informasi tentang pendidikan tersebut sangat kurang optimal untuk benar-benar tersampaikan kepada masyarakat ekonomi lemah. Dalam hal ini yang dimaksud akses

adalah segala kemudahan yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut dapat didukung oleh keberadaan tempat tinggal, sarana komunikasi, sarana transportasi, dan lain-lain.

Adapun masyarakat ekonomi lemah yang tetap menempuh pendidikan hingga memasuki jenjang SMA atau akan memasuki jenjang tersebut, sangat rentan untuk melakukan putus sekolah. Nasser and Oduro (2016) menyimpulkan dalam penelitian mengenai pembangunan pendidikan, bahwa status kemiskinan rumah tangga dapat menentukan apakah seorang anak akan melakukan transisi dari Pendidikan Dasar ke Sekolah Menengah Pertama maupun menuju Sekolah Menengah Atas.

### **Pengaruh Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Surabaya**

Sekolah merupakan wujud tempat yang digunakan dalam kelangsungan program pendidikan. Penyediaan sekolah adalah untuk menampung peserta didik sebanyak kapasitas sekolah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah penawaran peserta didik terus meningkat maka menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan sekolah dengan kapasitas yang diperlukan.

Membahas mengenai jumlah sekolah dan peserta didik tentunya berfokus pada seberapa besar tingkat penawaran peserta didik terhadap ketersediaan sekolah. Namun dalam penelitian ini melihat sebaliknya, dari adanya ketersediaan sekolah maka seberapa besar akan dapat berimplikasi terhadap tingkat pendaftaran peserta didik. Zimmerman and Neilson (2014) dalam penelitian di Amerika

menemukan adanya pengaruh pembangunan sekolah terhadap angka partisipasi sekolah yang ditunjukkan dengan peningkatan pendaftaran jumlah siswa sebesar 17,3% sejak pasca konstruksi.

Hasil estimasi variabel jumlah sekolah dapat memenuhi hipotesa karena bentuk hipotesis adalah dua arah (positif atau negatif). Variabel ini lebih banyak mendominasi pengaruhnya daripada variabel tingkat kemiskinan terhadap APS sebesar 32,71%. Dengan hasil negatif maka yang terjadi di Surabaya yakni berkurangnya unit sekolah diikuti dengan peningkatan APS. Jumlah sekolah pada tahun 1999 sebanyak 307 unit dan bertambah menjadi 313 pada tahun 2000. Jumlah tersebut diikuti peningkatan pada prosentase APS. Sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran jumlah sekolah yang ditambah pada tahun tersebut dapat menyerap jumlah siswa semakin banyak. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah unit sekolah berangsur-angsur terus berkurang sampai akhir tahun 2015 dan perkiraan hingga saat ini berjumlah sekitar 257 unit.

Chankseliani (2014) melihat pentingnya pembangunan sekolah formal dengan status swasta terutama di negara berkembang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah. Ungkapan dalam penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama dengan penelitian ini namun beda dalam prosesnya. Penelitian terdahulu melihat objek tunggal yakni pada konstruksi sekolah yang akan menyerap partisipasi siswa sehingga hasilnya benar demikian bahwa sejak tahun 2000, pendaftaran di tingkat sekolah menengah naik dari 19% sampai 22% dan di tingkat pendidikan dasar dari 10% sampai 14% (Bank Dunia, 2013).

Studi dalam (Chankseliani: 2014) sebenarnya menemukan dua bukti yang saling bertolak belakang. Tujuan awal konstruksi untuk meningkatkan peran pendidikan terutama bagi masyarakat diluar jangkauan di negara berkembang yang rata-rata pendapatannya masih rendah. Namun sebaliknya yang berpartisipasi tinggi dalam konstruksi sekolah baru adalah negara dengan ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut mengindikasikan adanya tambahan biaya pada model sekolah baru yang berstatus swasta demi peningkatan kualitas. Hal tersebut tidak heran membuat angka partisipasi yang lebih tinggi pada negara non-berkembang yang justru lebih bebas mengoptimalkan kemajuan sekolah tanpa dikekang kebijakan pemerintah. Penelitian tersebut menambahkan catatan bahwa semakin lama, terdapat perbaikan kualitas pada sekolah baru berstatus swasta dan tentunya semakin banyak biaya yang dibutuhkan.

Perbedaan dugaan dari landasan teori penelitian ini dengan sasaran Kota Surabaya, akan melihat kembali faktor-faktor lain yang memungkinkan lebih berpotensi besar dalam mempengaruhi APS. Secara kebetulan pengurangan jumlah sekolah berjalan signifikan dengan penurunan APS dibandingkan saat terjadi kenaikan. Jika variabel sebelumnya (tingkat kemiskinan) berjalan sesuai dugaan landasan teori, maka pada variabel ini dimungkinkan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi pengurangan jumlah sekolah itu sendiri. Sehingga meskipun dalam jangka panjang APS diprediksi akan kembali normal dan terus meningkat, namun adanya jumlah sekolah belum tentu dapat terus berdiri jika tanpa dukungan APS yang benar-benar optimal.

Secara logis, pencapaian APS yang masih berkisar 75% menunjukkan sebesar 25% anak usia 16-18 tahun masih belum mengikuti program pendidikan. Jika penduduk total usia 16-18 berkisar 139.156 jiwa maka sebanyak 34.789 anak yang tersebar belum mendapat pendidikan tanpa dapat diidentifikasi keberadaannya (sumber: Laporan BPS-Surabaya dalam Angka Tahun 2014). Kondisi tersebut tidak memungkinkan akan adanya penambahan jumlah sekolah jika memang untuk memenuhi target APS di masa mendatang, tetapi peningkatan APS-pun dirasa belum mencukupi kapasitas sekolah yang tersedia. Kebijakan pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengurangi jumlah sekolah demi efisiensi biaya pendidikan dan efektivitas pelayanan sekolah secara keseluruhan.

Secara empiris tujuan penyediaan sekolah telah sejalan dengan upaya pembangunan pendidikan. Namun sebuah penelitian yang sama yang memiliki perbedaan tempat dan waktu sangat mungkin akan terdapat perbedaan dalam fakta yang terjadi di lapangan.

Pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Surabaya

Nasser and Oduro (2016) melakukan studi empiris dengan fenomena yang cenderung sama dalam penelitian ini. Meskipun tujuan penelitian berbeda tetapi penelitian di Ghana melihat bagaimana angka partisipasi siswa yang sedang terjadi, masalah pendidikan di daerah perkotaan, serta faktor-faktor lain yang berkorelasi terhadap masalah tersebut.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, APS di Kota Surabaya

telah mencapai 90% lebih namun memasuki jenjang SMA hanya mencapai 70%. Sementara penelitian di Ghana yang serupa menunjukkan penurunan pada angka partisipasi usia 13-16 yang bisa dikatakan setingkat dengan SMA. Kesamaan fenomena tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup global di berbagai daerah perkotaan di negara-negara berkembang yakni masalah sosio-ekonomi.

Hasil penelitian APS di Kota Surabaya terutama untuk kelompok usia 16-18 tahun sebesar 55,33% dapat dijelaskan oleh faktor tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah (sumber: uji regresi diolah). Perubahan kedua variabel bebas yang dapat berpengaruh pada APS dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 3 Prosentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Sekolah di Surabaya (1999-2015)

Tahun	Kemiskinan (%)	Jumlah Sekolah (unit)	APS (%)
1999	8.02	307	56.36
2000	7.8	313	64.66
2001	11.54	277	56.86
2002	8.69	266	56.13
2003	9.54	171	57.73
2004	9.22	171	67.79
2005	7.1	158	68.65
2006	6.99	158	69.56
2007	7.2	158	87.08
2008	7.23	153	87.36
2009	5.83	153	80.97
2010	6.68	146	85.87
2011	6.06	147	71.69
2012	5.62	197	69.68
2013	5.29	264	64.14
2014	5.76	257	73.34
2015	5.82	257	75.19

Sumber: BPS Jatim-Surabaya dalam Angka (1999-2015), diolah

Secara bersama-sama ketiga variabel tersebut berjalan dengan saling ketergantungan. Tujuan utama pemerintah dalam bidang pendidikan adalah mengacu pada pencapaian APS. Di sisi ekonomi, masalah kemiskinan menjadi kendala yang belum teratasi sepenuhnya. Sementara kemiskinan itu sendiri terus menguat seiring adanya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta pengangguran.

Chankseliani (2014) telah menyebutkan salah satu karakteristik yang sama dari negara-negara berkembang yakni permasalahan pembangunan ekonomi. Sebagaimana kota besar lainnya, Surabaya terus mengalami peningkatan demografi baik dari dalam kota maupun dari urbanisasi. Ketimpangan antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan tingginya pengangguran dan angka kemiskinan.

Berkaitan dengan upaya pengembangan pendidikan, sedikit demi sedikit pemerintah telah memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan tersebut. Singkatnya semakin rendah tingkat kemiskinan maka secara tidak langsung APS akan semakin meningkat dan stabil. Karena pada intinya, masalah kemiskinan akan menghalangi seseorang untuk mengenyam pendidikan karena keterbatasan finansial.

Pemerintah mencoba memberikan solusi lainnya baik menambah cara baru atau mengurangi masalah yang menjadi kendala utama. Mandic et.al (tahun tidak disebutkan) menemukan bahwa keberadaan sekolah yang dekat dengan lingkungan masyarakat sangat

penting dalam pengambilan keputusan untuk mendaftar sekolah terutama di masyarakat dengan lingkungan sosial ekonomi rendah.

Kebijakan penambahan jumlah sekolah dapat terlihat dalam tabel 3 yang secara realistis dari tahun 1999 ke tahun 2000 terdapat penambahan jumlah sekolah. Seiring dengan upaya pemerataan pendidikan, pemerintah Surabaya berupaya menyediakan sekolah secara merata sehingga mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat mengurangi biaya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu terutama dari biaya transportasi. Moyi (2010) melihat peluang dalam penelitiannya dalam mengatasi masalah penundaan pendaftaran sekolah akan teratasi dengan penambahan jumlah sekolah yang dekat dengan masyarakat.

Di tengah berjalannya upaya penambahan jumlah sekolah, terdapat masalah lainnya. Terjadinya masalah putus sekolah yang mencapai 6000 siswa tahun 2012 sangat berdampak pada jumlah siswa jenjang SMA-sederajat. Sebelum mencapai APS yang maksimal, siswa-siswa dari keluarga kurang mampu lebih memilih untuk putus sekolah dikarenakan faktor kondisi keluarga itu sendiri serta lingkungan sosial. Bagi anak usia 16-18 yang dirasa sudah cukup besar dan dihadapkan dengan keadaan himpitan ekonomi, maka mereka akan memilih menjadi tulang punggung keluarganya. Di sisi lain, kebutuhan akan pendidikan di jenjang yang tinggi juga akan membutuhkan biaya yang lebih banyak.

Kondisi tersebut berdampak pula pada masa depan sekolah dimana siswa setiap tahun tidak dapat meningkat secara stabil, akan tetapi justru muncul masalah baru dengan

banyaknya siswa yang memilih putus sekolah. Oleh karena itu, pengurangan jumlah sekolah merupakan pilihan pemerintah yang tepat untuk mempermudah mengkoordinir seluruh sekolah tingkat SMA-Sederajat demi kemajuan pendidikan.

Baik variabel tingkat kemiskinan, jumlah sekolah maupun APS, ketiganya saling berkaitan. Secara langsung, tingkat kemiskinan berpengaruh pada APS, sedangkan jumlah sekolah yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan APS justru ditentukan berdasarkan APS yang dapat dicapai. Pada urutan ketiganya, peningkatan APS dapat tercapai jika tingkat kemiskinan berkurang dan jumlah sekolah akan teroptimalisasi dengan baik

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Surabaya berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS). Hubungan yang terbentuk bersifat negatif, dimana jika tingkat kemiskinan mengalami kenaikan maka APS akan menurun.
2. Jumlah sekolah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap APS. Hubungan yang terbentuk bersifat negatif, dimana penurunan jika jumlah sekolah mengalami kenaikan maka APS akan menurun.
3. Tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap APS Kota Surabaya.

## Saran

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan upaya dalam penekanan angka kemiskinan terutama dari berbagai kebijakan pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat membantu menaikkan APS SMA-Sederajat.
2. Mengoptimalkan program sosialisasi mengenai informasi bantuan pendidikan di jenjang SMA-Sederajat terutama bagi masyarakat kurang mampu.
3. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah kota dengan perangkat kelurahan terutama untuk daerah yang mencakup lingkungan masyarakat menengah kebawah agar memudahkan pemerintah dalam memantau perkembangan pendidikan masyarakatnya.
4. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orangtua untuk mengantisipasi masalah putus sekolah terutama bagi siswa SMA-Sederajat.
5. Untuk jumlah sekolah sebaiknya tetap menyesuaikan dengan porsi siswa yang telah terdaftar dalam tahun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul, Sari, D.W., Setianto, R.H., Primanti, M.R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Surabaya Dalam Angka Tahun 1999-2015*. Surabaya: BPS Kota Surabaya
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Surabaya: BPS Kota Surabaya
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Surabaya: BPS Jatim
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Survei Sosial Ekonomi Nasional: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Surabaya: BPS Jatim
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Laporan Eksekutif Pendidikan: Data Susenas 2010-2016*. Surabaya: BPS Jatim
- Badan Pusat Statistik Indonesia. [www.bpspusat.go/id](http://www.bpspusat.go/id)
- Chankseliani, Maia. 2014. "Are We Using Friedman's Roadmap? A Comparative Analysis of Stimuli of Private School Enrolments in Post-Soviet Countries". *Journal of Educational Development*. No. 38, pp: 13-21 (www.elsevier.com, diakses 5 Juni 2017)
- Chan, Sam M. dan Emzir. 2010. *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Fanie, Zainuddin. 2011. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tinta Medina
- Johri. 2005. *Foundations of Education*. New Delhi: Anmol Publication
- Mandic, Sandra, Susan Sandrettob, Enrique García Bengoecheac, Debbie Hopkinsd, Antoni Mooree, Judith Roddae, Gordon Wilson. 2016. "Enrolling in the Closest School or Not? Implications of school choice decisions for active transport to school." *Journal of Transport and Health*. (www.elsevier.com, diakses 5 Juni 2017)

- Mulfrod, Bill, Diana Kendall, John Ewington, Bill Edmunds, Lawrie Kendall and Halia Silins. 2008. "Successful principalship of high-performance schools in high-poverty communities". *Journal of Educational Administration*. Vol. 46(4): pp. 461-480. Online, ([www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com), diakses pada 08 Januari 2017)
- Moyi, Peter. 2010. "Household characteristics and delayed school enrollment in Malawi." *Journal of Educational Development*. No. 30, pp: 236-242. Online (diakses pada 3 Juni 2017)
- Nasser, Hellen A. Seshie and Oduro, Abena D. 2016. "Delayed primary school enrolment among boys and girls in Ghana." *Journal of Educational Development*. No. 49, pp: 107-114 ([www.elsevier.com](http://www.elsevier.com), diakses 6 Juni 2017)
- Neilson, Christopher A. dan Zimmerman, Seth D. 2014. "The Effect of School Construction on Test Scores, School Enrollment, and Home Prices". *Journal of Public Economics*. No 120: Hal. 18-31. Online, ([www.elsevier.com](http://www.elsevier.com), diakses pada 15 Desember 2017)
- Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Online, (alamat tidak dicantumkan, diakses 02 Oktober 2016)
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara